

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI
SEKRETARIAT DEPUTI**

NOTA DINAS

NOMOR: AK.03.01/89/D.II.M.EKON.1/4/2026

Yth. : Plt. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Dari : Plt. Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Triwulan I Tahun 2026
Tanggal : 10 April 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas

Dalam rangka implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Triwulan I Tahun 2026. Adapun narasi capaian kinerja dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/LapkinTwlSesdepD2> sedangkan dokumen pendukung capaian kinerja tersebut dapat diakses melalui tautan berikut: <https://bit.ly/4aOXIOA>.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudari, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi
Kerja Sama Ekonomi dan Investasi,



Jenny M.T. Sihombing
NIP. 197906122005022001

Tembusan Yth.:
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi pada Triwulan I Tahun 2026 ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan I 2026	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Program 1. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas</i>					
1.1	Indikator 1.1 Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	%	100	25	22,92	91,67
1.2	Indikator 1.2 Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	%	100	25	25	100
1.3	Indikator 1.3 Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	%	100	25	25	100
1.4	Indikator 1.4 Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	%	100	25	25	100
1.5	Indikator 1.5 Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputy	%	100	25	25	100
1.6	Indikator 1.6 Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	%	75	N/A	N/A	100
1.7	Indikator 1.7 Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	100

Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi pada Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas
----------	---

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian 7 indikator kinerja yaitu:

1. Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
2. Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
3. Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
4. Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
5. Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputy
6. Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
7. Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Latar Belakang

Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja mampu mengimplementasikan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada prakteknya, implementasi Reformasi Birokrasi diukur dengan dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedeputian. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan implementasi Reformasi Birokrasi yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian dokumen/laporan berdasarkan periode laporan tertentu (triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.

Ruang lingkup Implementasi Reformasi Birokrasi diukur dari kegiatan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik pada Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang mendukung pencapaian indikator RB Kementerian sebagaimana diatur pada Peraturan Menpan-RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Adapun waktu penyampaian dokumen/laporan disesuaikan dengan Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi.

Penilaian kegiatan Reformasi Birokrasi diukur dari pemenuhan bukti dukung sebagai berikut:

No	Indikator	Jenis Bukti Dukung	Jumlah Bukti Dukung	Standar Ketepatan Substansi	Standar Ketepatan Waktu
1	Rencana Aksi Pembangunan	Pemetaan Rencana	1 Dokumen	Mengacu ND Biro MKKS	Triwulan III

	RB	Aksi RB Tematik 2026			
2	Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	Dokumen Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja	7 Dokumen	Dokumen tertandatangani	Triwulan III
3	Tingkat Maturitas SPIP	1. Dokumen Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP 2. Dokumen matriks Manajemen Risiko	8 Dokumen	Dokumen tertandatangani	1. SPIP : TW II 2. MR : TW III
4	Nilai SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat	1 Dokumen	Mengacu ND Inspektur	Mengacu ND Inspektur
5	Indeks Perencanaan Pembangunan	1. Revisi Renja 2026 2. Usulan Renja 2027 3. TOR RAB setelah revisi Renja 2025	3 Dokumen	Mengacu ND Biro MKKS	1. Revisi Renja 2026: TW II 2. Renja 2027: TW I 3. TOR-RAB Revisi: TW III
6	Tingkat Digitalisasi Arsip	Rekap Dokumen dalam Srikandi	12 Dokumen	Dokumen terdisposisi Dokumen tertandatangani	Tanggal 5 bulan berikutnya
7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	- Laporan Realisasi Anggaran - Rencana Penarikan Dana (RPD)	16 Dokumen	Uraian program/kegiatan/RO/Komponen Pagu Realisasi Sisa anggaran	Tanggal 5 bulan berikutnya
8	Tingkat tindak lanjut	Dokumen Hasil Tindak	2 Dokumen	Mengacu ND Inspektorat	Triwulan II dan IV

	pengaduan masyarakat melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)	lanjut Laporan Hasil pemantauan SP4N-LAPOR!			
9	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Dokumen pengisian dan pencatatan SIRUP	2 Dokumen	SIRUP terisi lengkap	Triwulan I dan IV
10	Indeks Sistem Merit	▪ Dokumen pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja BKN ▪ Dokumen usulan formasi ASN	2 Dokumen	Mengacu ND dari Biro Umum	▪ E-Kinerja: TW I ▪ Usulan Formasi: TW IV
11	Capaian IKU	Laporan Kinerja Triwulanan	4 Dokumen	▪ Ringkasan Kinerja Triwulanan ▪ Narasi setiap IKU a. Latar belakang b. Hasil pengukuran kinerja c. Pelaksanaan Rencana Aksi triwulanan, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya d. Kendala dan upaya perbaikan pencapaian target	Mengacu pada ND Kepala Biro MKKS
12	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Capaian Akuntabilitas Keuangan)	Dokumen Pendukung pemeriksaan BPK	1 Dokumen	Mengacu ND dari Inspektorat	Triwulan II Tahun berikutnya

13.	Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Capaian Akuntabilitas Keuangan)	Dokumen hasil rekomendasi BPK	1 Dokumen	Mengacu ND dari Inspektorat	Triwulan II dan IV
14	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Dokumen Usulan data responden Internal dan Eksternal	1 Dokumen	Mengacu ND dari Inspektorat	Triwulan II
15	Indeks BerAKHLAK	Dokumen Usulan Agen Perubahan	1 Dokumen	Mengacu ND dari Biro Hukum dan Organisasi	Triwulan II
Total			64 Dokumen		

Terdapat koreksi untuk jumlah dokumen sesuai yang dicantumkan pada tabel di atas yaitu menjadi 64 dokumen.

Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dihitung berdasarkan seberapa banyak bukti dukung RB General dan RB Tematik yang dihasilkan sesuai standar di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bukti dukung yang telah dihasilkan. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi :

$$\text{Tingkat Implementasi RB} = \frac{\text{Total Bukti Dukung RB yang dihasilkan sesuai standar}}{\text{Total Bukti Dukung RB yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif serta pada dokumen perencanaan Sekretariat Deputy Tahun 2026. Adapun target triwulan sebesar 25%.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi telah terealisasi sebesar 22,92% atau mencapai kinerja 91,67% dari target Tw I Tahun 2026 sebesar 25% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	%	25	22,92	91,67 (Memuaskan)

Dokumen bukti dukung Reformasi Birokrasi yang telah dihasilkan sesuai standar pada triwulan I 2026 antara lain:

1. Rencana Kerja Tahun 2026 (1 dokumen)
2. Perjanjian kinerja, Manual Iku dan rencana aksi perjanjian kinerja (3 paket Dokumen)
3. Tim Kerja (1 dokumen)
4. Laporan Kinerja (1 pakt dokumen)
5. Rekap Dokumen dalam Srikandi (3 Dokumen)
6. Laporan Realisasi Monev Anggaran (3 Dokumen)
7. Dokumen RPD (1 dokumen)
8. Dokumen Pengisian dan Pencatatan SIRUP (3 Dokumen)
9. Dokumentasi penggunaan aplikasi E-Kinerja BKN untuk Sasaran Kinerja Pegawai (1 dokumen)

Realisasi triwulan I didorong oleh adanya komitmen dari pimpinan yaitu Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang menginstruksikan bahwa penguatan tata kelola dan reformasi birokrasi harus selaras dengan pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif sehingga organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan

			(Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU tahun 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat penyusunan penetapan perjanjian kinerja, rencana aksi, dan manual IKU tahun 2026 baik secara internal di lingkungan Kedeputan 2 maupun pembahasan bersama dengan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama. Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU tahun 2026 telah ditetapkan pada Januari 2026
2.	Penyusunan Renja 2027	Terlaksana	Telah dilaksanakan pengisian matriks usulan Renja 2027.
3.	Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja	Terlaksana	Telah dilakukan penyusunan dan penetapan tim kerja di Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi No 1 Tahun 2026.
4.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I	Terlaksana	Telah selesai dilakukan penyusunan laporan kinerja triwulan I.
5.	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI Triwulan I	Terlaksana	Telah dilaksanakan optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI untuk pemrosesan surat dan disposisi secara rutin selama triwulan I.
6.	Monev Realisasi Anggaran Triwulan I	Terlaksana	Telah dilaksanakan secara rutin pengisian laporan capaian anggaran melalui E-Monev di Triwulan I.
7.	Penyusunan RPD	Terlaksana	Telah dilaksanakan pada bulan Januari 2026 melalui

			kegiatan pengisian matrik RPD dari Biro MKKS.
8.	Pencatatan Rencana Pengadaan pada SIRUP	Terlaksana	Telah dilaksanakan pada Januari 2026 melalui Aplikasi LPSE.
9.	Monev Pemanfaatan Aplikasi e-kinerja BKN	Terlaksana	Telah dilaksanakannya penyusunan SKP Target pegawai pada triwulan I tahun 2026.
10.	Pemetaan Rencana Aksi RB Tematik 2026	Tertunda	Pemetaan Rencana Aksi RB Tematik 2026 masih menunggu arahan lebih lanjut dalam penyusunan rencana aksi berdasarkan catatan dan rekomendasi dari KemenPAN-RB dan sesuai manual IKU dijadwalkan selesai pada Tw III tahun 2026.
11.	Penyusunan Bahan Rapat Pimpinan	Terlaksana	Terlaksana pada Apel pagi tanggal 9 Februari 2026 serta Dialog Kinerja tanggal 31 Maret 2026.
12.	Dukungan Publikasi Konten dan Penggunaan Logo BerAKHLAK	Terlaksana	Terlaksana publikasi konten dan penggunaan logo berAKHLAK pada bahan paparan dan sertifikat pelatihan.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja ini diantaranya mengoptimalkan peran Agen Perubahan melalui Surat Edaran Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi. Agen Perubahan memiliki program yang terbukti nyata untuk meningkatkan *well being* pegawai. Adapun program yang diusung adalah "*well-being in action*" yang terdiri dari My Connection, My Career, My Health, My Finance, My Mind.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pengalihan metode koordinasi yang semula berbasis pertemuan tatap muka menjadi pertemuan online/daring melalui media zoom meeting atau dilakukan secara hybrid. Kebijakan ini terbukti mengefisienkan biaya konsumsi dan ruang rapat. Selain itu, efisiensi dilakukan dengan mengurangi penggunaan kertas dalam

penyusunan naskah dinas melalui digitalisasi penggunaan SRIKANDI, memanfaatkan kembali kertas yang tidak terpakai seperti untuk penempelan bukti dukung perjalanan dinas, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 88.578.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan lainnya yang mendukung implementasi RB di Deputy II sesuai arahan pimpinan.

Tantangan dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat tantangan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan antara lain:

1. Internalisasi budaya reformasi birokrasi yang belum merata diantara seluruh pegawai mengingat Reformasi Birokrasi bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif formalitas melainkan sebuah budaya kerja inheren untuk mencapai sasaran yang diinginkan.
2. Penyelarasan batas waktu administratif dengan upaya tindak lanjut terkadang mengalami keterlambatan karena berjalan simultan dari unit pengampu dengan waktu yang relatif singkat.

Berdasarkan tantangan dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai. Upaya tersebut diantaranya:

1. Mengadakan sesi berbagi pengetahuan (*sharing session*) singkat yang bersifat informal namun substantif. Sebagai upaya efisiensi anggaran, kegiatan ini dilaksanakan secara daring tanpa biaya akomodasi atau narasumber luar, melainkan mengoptimalkan peran anggota Tim Reformasi Birokrasi.
2. Koordinasi dengan pengampu serta PIC Reformasi Birokrasi level Eselon II dalam penyelarasan tindak lanjut batas waktu administratif melalui email atau aplikasi pesan tidak berbayar.

1.2. Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Latar Belakang

Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diemban. Ketercapaian sasaran strategis ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja mampu mengimplementasikan tata kelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada prakteknya, implementasi tata kelola diukur dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan tata kelola di lingkungan Kedeputan. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan implementasi tata kelola yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan

waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar.

Ruang lingkup Implementasi tata kelola diukur dari data dukung dokumen tata kelola meliputi dokumen keuangan, sistem pengendalian internal, data dan informasi, organisasi, tata laksana dan SDM, BMN, kearsipan, humas, protokol, persidangan, naskah pimpinan, hukum, dan SOP. Adapun waktu dan format akan diatur lebih lanjut melalui nota dinas Kepala Biro yang akan mengampu dokumen dimaksud. Adapun ruang lingkup implementasi tata kelola secara spesifik tercantum pada tabel berikut:

No	Tata Kelola	Jenis Bukti Dukung	Jumlah Bukti Dukung	Standar Substansi	Standar Ketepatan Waktu
1.	Keuangan	- TOR dan RAB - ND Revisi POK - Laporan Realisasi dan Sisa Anggaran	6 Dokumen 6 Dokumen 12 Dokumen	- Latar Belakang, Penerima Manfaat, Strategi Pencapaian - Keluaran, Biaya yang Dibutuhkan - Usulan Penyesuaian Akun Anggaran, Alasan revisi berdasarkan IKU - Uraian program/kegiatan/RO/Komponen, Pagu, Realisasi, Sisa anggaran	- Pertengahan tahun untuk tahun berikutnya - Tanggal 25 setiap bulan pengajuan - Tanggal 5 bulan berikutnya
2.	Sistem Pengendalian Internal	- Kertas Kerja Manajemen Risiko - Kertas Kerja SPIP	7 Dokumen 1 Dokumen	Form Konteks, Form Profil & Peta Risiko, Form Mitigasi Risiko, Perka BPKP 5/2021	- Mengacu pada ND Inspektur - Mengacu pada ND Inspektur
3.	Tata Laksana dan SDM	- ND Usulan Kenaikan Pangkat - ND Usulan Kenaikan Jenjang - ND Usulan Pendidikan dan Pelatihan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	- Data Pegawai, Dokumen Pendukung - Data Pegawai, Dokumen Pendukung - Data Pegawai, Dokumen Pendukung	- Menyesuaikan kebutuhan pegawai - Mengacu pada ND Kepala Biro Umum dan SDM - Mengacu pada ND Kepala Biro Umum dan SDM
4.	Barang Milik	ND Rencana Kebutuhan	1 Dokumen	Jumlah Kebutuhan, Tahun Anggaran	Mengacu pada ND Kepala

	Negara	BMN			Biro Umum dan SDM (Akhir Tahun untuk 2 Tahun Berikutnya)
5.	Kearsipan	Rekap Dokumen dalam Srikandi	12 Rekap Dokumen	Dokumen terdisposisi Dokumen tertandatangani Pemberkasan	Tanggal 5 bulan berikutnya
6.	Humas	Publikasi melalui website atau social media	4 Dokumen Rekap Hasil Publikasi	Kegiatan Pimpinan/ Masing-masing unit kerja	max 3 hari setelah kegiatan
7.	Naskah Pimpinan	1. Bahan Sambutan Deputi untuk Apel Pagi 2. Bahan Dialog Kinerja	1. 4 Dokumen 2. 1 Dokumen	1. Update isu strategis dan kegiatan yang telah dan akan dilakukan 2. Update isu strategis, evaluasi kegiatan yang dilakukan dan arahan ke depan	1. H-3 pelaksanaan Apel Pagi 2. H-2 Sebelum Pelaksanaan Dialog Kinerja
8.	Standar Operasional Prosedur/ SOP	SOP Koordinasi Data dan Informasi Tata Kelola di Lingkungan D2	1 Dokumen	Koordinasi Data/Informasi Tata Kelola di lingkungan Deputi atas inisiatif Unit kerja dan atas permintaan Sekretariat Kementerian/ Inspektorat	Triwulan I
	Total		58 Dokumen		

Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dihitung berdasarkan seberapa banyak bukti dukung Tata Kelola yang dihasilkan sesuai standar di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bukti dukung yang telah dihasilkan. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi:

$$\text{Tingkat Implementasi Tata Kelola} = \frac{\text{Jumlah Bukti Dukung Tata Kelola yang dihasilkan sesuai standar}}{\text{Jumlah Bukti Dukung Tata Kelola yang seharusnya}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%, penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Pasal 68 dan 69 terkait tugas dan fungsi Sekretariat Deputy dan dokumen perencanaan Perencanaan Kinerja (PK) Sekretaris Deputy Tahun 2026. Adapun target triwulan sebesar 25%.

Pada Triwulan I Tahun 2026, Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi terealisasi sebesar 25% atau mencapai kinerja 100% dari target Triwulan I Tahun 2026, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Persen	25	25	100

Dokumen bukti dukung tata kelola yang dihasilkan sesuai standar pada Triwulan I 2025 sebanyak 17 dokumen dengan rincian:

1. MPH dan SKP (2 paket dokumen)
2. TOR dan RAB (6 dokumen)
3. Laporan Realisasi Anggaran (3 dokumen)
4. Rekap Dokumen Dalam Srikandi (3 dokumen)
5. Bahan Sambutan Deputy pada Apel pagi 9 Februari 2026 (1 dokumen)
6. Bahan Dialog Kinerja (1 dokumen)

Capaian optimal ini diperoleh dengan menyelaraskan instrumen tata kelola yang meliputi kegiatan anggaran, sistem pengendalian internal, data dan informasi, organisasi, tata laksana dan SDM, BMN, kearsipan, humas, protokol, persidangan, naskah pimpinan, hukum, dan pelaksanaan SOP yang mendorong pelaksanaan implementasi tata kelola berjalan dengan baik.

Faktor-faktor strategis yang melandasi keberhasilan pencapaian target pada Triwulan I meliputi: 1. Komitmen Kepemimpinan yang Kuat (*Strong Leadership Commitment*) yang memosisikan tata kelola yang baik (*good governance*) sebagai fondasi utama pelaksanaan tugas dan fungsi; 2. Kemampuan Tim Sekretariat dalam mengadopsi pola kerja yang lincah (*agile working*) untuk menjembatani kebutuhan administrasi tata kelola.

Mengingat implementasi tata kelola pada Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi berjalan dengan baik maka diprediksikan kinerja

Sekretariat Deputy terkait implementasi tata kelola yang baik juga terpenuhi sesuai target tahun 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan Matriks Peran Hasil dan Penetapan SKP Target	Terlaksana	1. Telah disusun Matriks Peran Hasil di Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi. 2. Telah disusun dan ditetapkan Sasaran Kinerja Pegawai di Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.
2.	Pelaksanaan Tata Kelola Kepegawaian diantaranya pengusulan ujikom dan kenaikan pangkat pegawai	Terlaksana	1. Telah dilaksanakan pengusulan Penyesuaian Gelar dan Kenaikan Pangkat Pegawai Tahun 2026 di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Periode Februari 2025 melalui Nota Dinas resmi kepada Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia No: KP.08.01/21/D.II.M.EK ON.1/1/2026 tanggal 23 Januari 2026.

			2. Telah dilaksanakan pengusulan Pegawai Mengikuti Uji Kompetensi untuk Jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi melalui Nota Dinas resmi kepada Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia No: KP.08.01/50/D.II.M.EKO N.1/02/2026 tanggal 23 Februari 2026. 3. Telah dilaksanakan pengusulan Pegawai Mengikuti Uji Kompetensi untuk Jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi melalui Nota Dinas resmi kepada Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia No: KP.08.01/66/D.II.M.EKO N.1/03/2026 tanggal 12 Maret 2026.
3.	Pemetaan Pelatihan dan Workshop bagi pegawai	Terlaksana	Telah dilakukan pemetaan pelatihan dan Workshop bagi pegawai di Deputi bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sesuai kalender pelatihan dari Biro SDM.
4.	Koordinasi Penyiapan bahan pimpinan pada	Terlaksana	1. Telah dilaksanakan koordinasi penyiapan naskah pimpinan untuk pelaksanaan apel pagi

	Apel Pagi dan Dialog Kinerja		pada tanggal 9 Februari 2026; 2. Telah dilaksanakan Koordinasi penyiapan bahan paparan <i>flagship</i> program pada Dialog Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi tanggal 31 Maret 2026.
5.	Pelaksanaan dan Monitoring Tata Kelola Persuratan Menggunakan Srikandi	Terlaksana	1. Telah dilakukan penunjukan secara resmi admin Srikandi dan Tim Pengawasan Kerasipan Internal Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Tahun 2026 melalui Nota Dinas resmi kepada Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia tanggal 23 Januari 2026. 2. Telah dihadiri sosialisasi Permenko Perekonomian No. 21 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas dan Klasifikasi Arsip, serta pengenalan fitur baru di SRIKANDI, oleh seluruh pegawai di unit kerja pada tanggal 9 Februari 2026. 3. Telah terlaksanakan proses persuratan menggunakan aplikasi Srikandi sesuai dengan ketentuan terbaru secara konsisten dan berkelanjutan.
6.	Monitoring Realisasi Anggaran selama Triwulan I	terlaksana	Telah terlaksanakan monitoring realisasi anggaran selama Triwulan I tahun 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja diantaranya melakukan koordinasi Penyusunan *Brief Notes dan Talking Points* Pimpinan pada *Indonesia–China Track 1.5 Dialogue* titled “*Shaping a Joint Foreign Policy Approach towards a Transformational Model in Clean Energy Partnership*” yang diselenggarakan pada 27-28 Januari 2026.

Dalam rangka mendukung kebijakan optimasi fiskal, pemenuhan target tata kelola pada triwulan I dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip *value for money* dan efisiensi anggaran. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

1. mengoptimalkan platform digital internal Kemenko Perekonomian seperti SRIKANDI, email kementerian, serta penyimpanan berbasis awan (*cloud-based workspace*) pada proses penyusunan, review, dan penyebarluasan instrumen tata kelola sehingga berhasil menghemat biaya cetak dokumen fisik (*zero-paper policy*) dan biaya logistik;
2. memanfaatkan kembali kertas yang tidak terpakai seperti untuk penempelan bukti dukung perjalanan dinas;
3. mengalihkan konsolidasi penataan tata laksana antar unit eselon II dari metode konvensional (hotel/luar kantor) menjadi pertemuan hibrida dan/ atau daring.

Langkah-langkah tersebut memangkas pengeluaran paket rapat, uang saku, konsumsi, dan transportasi dinas secara signifikan tanpa mengurangi kualitas hasil koordinasi. Oleh karenanya, proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 88.578.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan tata kelola atau kegiatan strategis lainnya sesuai arahan pimpinan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau tantangan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala tersebut antara lain proses transisi menuju tata kelola berbasis digital (seperti tanda tangan elektronik berkelanjutan dan pelacakan surat digital) masih menghadapi kendala teknis minor di lapangan seperti gangguan koneksi internet, yang berpotensi menghambat kecepatan respons birokrasi jika tidak dimitigasi dengan cepat.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan diantaranya Berkoordinasi lintas PIC Tata kelola di level Eselon II melalui email atau aplikasi pesan singkat tidak berbayar sehingga terdapat pengingat berbasis digital untuk memantau batas waktu pemenuhan kewajiban tata kelola di setiap unit Asdep secara berkala.

1.3. Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama

Latar Belakang

Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diemban. Ketercapaian sasaran strategis ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berfokus pada

Ekonomi dan Investasi

koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi merupakan ukuran yang menggambarkan efektivitas perencanaan unit kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada prakteknya, Tingkat Efektivitas Perencanaan diukur dengan dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan perencanaan di lingkungan Kedeputan. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan Tingkat Efektivitas Perencanaan yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.

Ruang lingkup Tingkat Efektivitas Perencanaan tahun 2026 diukur dari data dukung dokumen perencanaan meliputi dokumen Rencana Strategis (Renstra) Deputy (sebagai acuan), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Manual IKU, Rencana Aksi, TOR RAB, dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

No	Perencanaan	Jumlah Dokumen	Standar Substansi	Standar Ketepatan Waktu
1.	Perjanjian Kinerja	7 Dokumen	<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound</i>	2 Januari 2026
2.	Manual IKU	7 Dokumen	<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound</i>	2 Januari 2026
3.	Rencana Aksi	7 Dokumen	Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama, Target, Inisiatif Strategis, Rencana Aksi Kinerja	2 Januari 2026
4.	Rencana Kerja	1 Dokumen	<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound</i> memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan prakiraan maju	Awal tahun untuk tahun berikutnya
5.	TOR dan RAB	6 Dokumen	Latar Belakang, Penerima Manfaat, Strategi Pencapaian Keluaran, Biaya yang Dibutuhkan	Pertengahan untuk tahun berikutnya
6.	Sasaran Kinerja Pegawai	1 Dokumen	▪ Rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi ▪ Rencana hasil kerja ▪ Indikator kinerja individu ▪ Target	31 Januari 2026

Total	29	Dokumen	
-------	----	---------	--

Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dihitung berdasarkan seberapa banyak bukti dukung Perencanaan yang dihasilkan sesuai standar di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bukti dukung yang telah dihasilkan. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi :

$$\text{Tingkat Efektivitas Perencanaan} = \frac{\text{Jumlah bukti dukung perencanaan yang dihasilkan sesuai standar}}{\text{Jumlah bukti dukung perencanaan yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100% penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Pasal 68 dan 69 terkait tugas dan fungsi Sekretariat Deputy dan dokumen perencanaan Perencanaan Kinerja (PK) Sekretaris Deputy Tahun 2026. Adapun target triwulan sebesar 25%.

Pada Triwulan I Tahun 2026, Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi mencapai target atau terealisasi sebesar 25% atau mencapai kinerja sebesar 100% dari target Tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.3 Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Persen	25	25	100 (Memuaskan)

Dokumen perencanaan yang telah dihasilkan sesuai standar pada triwulan I Tahun 2026 sebanyak 22 dokumen, yaitu:

1. Perjanjian Kinerja (7 dokumen terdiri atas 1 Deputy, 1 Sekretariat Deputy, 5 Keasdepan)
2. Manual IKU (7 dokumen terdiri atas 1 Deputy, 1 Sekretariat Deputy, 5 Keasdepan)

3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (7 dokumen terdiri atas 1 Deputi, 1 Sekretariat Deputi, 5 Keasdepan)
4. Sasaran Kinerja Pegawai (1 paket dokumen)

Capaian optimal ini dicapai melalui keberhasilan unit dalam menyusun dan menetapkan Dokumen Perencanaan di tingkat kedeputan secara tepat waktu dan presisi. Proses perencanaan pada triwulan ini telah berhasil menyelaraskan (*cascading*) target makro kebijakan kerja sama ekonomi dan investasi ke dalam target mikro operasional di setiap unit Asisten Deputi, sehingga menciptakan peta jalan (roadmap) pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan terukur sejak awal tahun anggaran.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1.3 Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyelesaian Isu Strategis, Program Kerja	Terlaksana	Sebagai kelanjutan dari ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) pada akhir tahun 2025, sebagai dasar arah kebijakan penyelesaian isu strategis, maka pada triwulan I tahun 2026 telah dilaksanakan penyelarasan penyelesaian isu strategis, dan program kerja yang menjadi fokus unit kerja di Kedeputan Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi antara lain: 1. Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD. 2. Terwujudnya Kemudahan Investasi yang Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi.

			3. Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi. 4. Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas.
2.	Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU yang selaras dengan RKP 2025 dan RPJMN 2025-2029	Terlaksana	Telah dilaksanakan Koordinasi penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), Manual IKU, Rencana Aksi Eselon I dan Eselon II Tahun 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

1. Penyusunan Perencanaan Berbasis *Shared-Workspace* dimana proses *brainstorming*, penyelarasan target, hingga reviu draf dokumen perencanaan antar-unit eselon II dilakukan sepenuhnya menggunakan platform kerja digital dan penyimpanan awan (*cloud-based shared drive*). Langkah ini berhasil mengefisienkan biaya pencetakan kertas (*paperless*) dan penggandaan berkas kerja yang biasanya memakan porsi anggaran cukup besar.
2. Rapat koordinasi dalam rangka penajaman target perencanaan dialihkan dari metode konvensional di hotel atau luar kantor menjadi pertemuan daring/hibrid. Kebijakan ini secara signifikan memangkas komponen belanja paket rapat, uang saku rapat, dan biaya transportasi dinas lokal tanpa mengurangi esensi dan kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan. Proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 88.578.000.

Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan **Perencanaan** atau kegiatan strategis lainnya sesuai arahan pimpinan yang akan dilakukan pada triwulan II tahun 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi diantaranya :

1. Dinamika geopolitik dan kerja sama ekonomi internasional serta pergeseran komitmen investasi sering kali berubah secara cepat. Hal ini menantang

- fleksibilitas perencanaan agar tetap selaras antara rencana kerja yang telah ditetapkan dengan kebutuhan penanganan isu strategis yang mendadak;
2. Kapasitas pegawai dalam pemetaan perencanaan yang belum merata sehingga masih memerlukan pendampingan intensif agar perencanaan yang dirumuskan tidak sekadar formalitas administratif, melainkan aplikatif terhadap pencapaian target.

Berdasarkan capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026 serta kendala yang dihadapi, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yaitu:

- 1) Menyusun strategi mitigasi berupa fleksibilitas revisi perencanaan operasional dalam hal ini dituangkan dalam rencana aksi perjanjian kinerja yang dapat disesuaikan secara fleksibel namun tetap akuntabel guna merespons dinamika perubahan agenda kerja sama ekonomi internasional dan investasi yang bersifat mendesak tanpa mengganggu perencanaan dalam perjanjian kinerja;
- 2) Menyelenggarakan penguatan kapasitas internal terkait penyusunan perencanaan berbasis risiko dengan memanfaatkan kompetensi pegawai Sekretariat sebagai fasilitator sehingga tidak membutuhkan biaya narasumber dari luar instansi.

2.1. Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Latar Belakang

Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diemban. Ketercapaian sasaran strategis ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja dapat memenuhi kewajiban penyampaian laporan nya secara tepat waktu, lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketaatan ini dinilai berdasarkan 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu. Adapun standar laporan yang diacu adalah Peraturan Menpan RB nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Permenpan 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Adapun ruang lingkup laporan yang termasuk pada indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Triwulan I s.d IV (10 hari kerja setelah triwulan berakhir)

2. E-Monev, (2 hari kerja pada tiap bulan)
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (akhir februari pada tahun berjalan) dan
4. Laporan SKP Triwulan I s.d IV (minggu terakhir pada bulan ke 4,7,10 dan 12)

Laporan dikatakan memenuhi standar jika telah memenuhi standar substansi dan ketepatan waktu dengan rincian sebagai berikut:

No.	Laporan	Jumlah Laporan	Standar Substansi	Standar Ketepatan Waktu
1.	Laporan Kinerja Triwulan I s.d IV	4 Dokumen	▪ Ringkasan Kinerja Triwulanan ▪ Narasi setiap IKU ○ Latar belakang ○ Hasil pengukuran kinerja ○ Pelaksanaan Rencana Aksi triwulanan, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ○ Kendala dan upaya perbaikan pencapaian target	15 hari kerja setelah triwulan berakhir
2	E-Monev	12 Dokumen	1. Pemantauan komponen a. Status pelaksanaan b. Realisasi fisik c. Realisasi anggaran 2. Pemantauan rincian output Renja a. Status pelaksanaan b. Realisasi fisik c. Realisasi anggaran	5 hari kerja pada tiap bulan
3	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Dokumen	▪ Daftar isi ▪ Peristiwa penting 2026 ▪ Ringkasan eksekutif ▪ Bab I : Pendahuluan ▪ Bab II : Perencanaan kinerja ▪ Bab III : Akuntabilitas Kinerja ▪ Bab IV : Evaluasi dan kinerja ▪ Bab V : Kesimpulan dan penutup	Konsep pada akhir Desember, final pada akhir februari pada tahun berikutnya
4	Laporan SKP	5 Paket Dokumen	▪ Rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi ▪ Rencana hasil kerja	Minggu terakhir pada bulan April,

	Triwulan I s.d IV		▪ Aspek ▪ Indikator kinerja individu ▪ Target ▪ Realisasi berdasarkan bukti dukung dan umpan balik	Juli, Oktober, Desember.
--	----------------------	--	---	--------------------------

Adapun formula perhitungan indikator Tingkat Ketaatan pelaporan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total laporan yang dilaksanakan sesuai standar ketepatan}}{\text{Total laporan yang diwajibkan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100% didasarkan pada ada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Pasal 68 dan 69 terkait tugas dan fungsi Sekretariat Deputy dan dokumen perencanaan Perencanaan Kinerja (PK) Sekretaris Deputy Tahun 2026. Adapun target triwulan I tahun 2025 sebesar 25%.

Pada Triwulan I Tahun 2026, Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi mencapai target yang telah terealisasi sebesar 25% atau mencapai kinerja 100% dari target Triwulan I Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.4 Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Persen	25%	25%	100% (Memuaskan)

Capaian optimal pada triwulan I ini diperoleh melalui keberhasilan unit dalam menyusun, menuntaskan, dan menyampaikan seluruh laporan manajerial serta laporan akuntabilitas secara tepat waktu dan substansi sesuai standar. Capaian ini membuktikan bahwa aspek transparansi dan akuntabilitas Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi berjalan selaras dengan target yang ditetapkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.4 Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan laporan kinerja triwulan I Tahun 2026
2.	Penyusunan Laporan E-Monev Bulan Januari s.d. Maret	Terlaksana	Telah dilaksanakan secara rutin pengisian laporan capaian anggaran melalui E-Monev pada setiap awal bulan pada tanggal 10 pada bulan berikutnya.
3.	Koordinasi Penyusunan Laporan SKP Triwulan I	Terlaksana	Telah dilaksanakan pengkoordinasian SKP Target dan Laporan SKP Triwulan I Tahun 2026.
4	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025	Terlaksana	Telah disusunnya LAKIP Tahun 2025 pada Januari 2026 sesuai dengan timeline yang ditetapkan.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi perhitungan, pelaporan dan penetapan Penilaian Kinerja Organisasi Unit Eselon 1 dan 2 di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

2. Melaksanakan koordinasi secara intens dan melaksanakan pengawalan kepada seluruh unit kerja Eselon 2 terkait pencapaian target di Triwulan I IKU Eselon I yang cascading secara langsung.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

1. Proses kompilasi data, reviu draf laporan, hingga finalisasi dokumen dilakukan secara digital menggunakan aplikasi internal di Kemenko Perekonomian dan penyimpanan awan (*cloud storage*). Penyampaian laporan ke unit pembina dikirimkan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*), sehingga berhasil efisiensi anggaran pencetakan, penjilidan, dan biaya logistik;
2. Proses rekonsiliasi data capaian kinerja dan realisasi anggaran dilakukan memanfaatkan rapat koordinasi rutin hibrida (*weekly updates*) yang sudah terjadwal, sehingga tidak memerlukan alokasi anggaran khusus untuk konsumsi rapat koordinasi pelaporan tersendiri.

Proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 88.578.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan perencanaan atau kegiatan prioritas lainnya sesuai arahan pimpinan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Meskipun pada Triwulan I Tahun 2026 berhasil dipenuhi secara optimal, proses mempertahankan ketaatan pelaporan di tingkat kedeputan menghadapi beberapa tantangan dinamis diantaranya:

1. Padatnya agenda sidang internasional, perundingan bilateral, dan pengawalan komitmen investasi di awal tahun membuat para konseptor pelaporan di unit Asisten Deputy (Asdep) mengalami hambatan dalam menyuplai data substansi *output* kebijakan karena prioritas kegiatan yang mendesak;
2. Mengompilasi laporan memerlukan waktu verifikasi yang cukup panjang guna memastikan akurasi data yang dilaporkan.

Berdasarkan capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026 serta kendala yang dihadapi, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yaitu:

1. Sekretariat Deputy berinisiatif dalam melakukan *pre-reminder* (peringat H-7) sebelum batas waktu resmi penyampaian laporan berakhir, yang meminimalkan risiko keterlambatan pengiriman dokumen pendorong (*evidence*);
2. Sekretariat Deputy mengirimkan Nota Dinas resmi permintaan penunjukan PIC dalam pelaporan yang responsif di setiap unit Asdep, sehingga jalur komunikasi dan penarikan data dapat berjalan lebih cepat dan fleksibel.

Diharapkan pada triwulan selanjutnya target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik dengan memperkuat sinergi antar unit kerja Eselon II di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

2.2. Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi

Latar Belakang

Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diemban. Ketercapaian sasaran strategis ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengamanatkan Sekretaris Deputy untuk dapat menjalankan penugasan lain yang diberikan oleh Deputy. Penugasan ini dapat bersifat tata kelola dan substantif yang bersifat lintas keasdepan. Khusus untuk penugasan yang bersifat substantif, Sekretaris Deputy bertanggung jawab untuk melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian terhadap isu-isu strategis yang menjadi fokus kedeputan.

Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi pada tahun ini mengawal isu – isu strategis kedeputan yang meliputi :

1. Posisi Indonesia terhadap usulan Pendirian Organisasi AI dunia (*World Artificial Intelligence Cooperation Organization*);
2. Potensi Kerja Sama RI RRT dalam mendukung Pengembangan Artificial Intelligence Development di Indonesia;
3. Penerimaan Kunjungan dari Delegasi RRT ke Indonesia dalam rangka Kerja Sama Ekonomi, Investasi, dan Inovasi;
4. Kerjasama RI-RRT untuk Pelatihan on *Upskilling Negotiation for Government Officials* of Indonesia

Adapun kriteria isu-isu strategis selesai apabila:

- (1) Isu Strategis telah ditindaklanjuti oleh Pihak terkait;
- (2) Hasil penyelesaian telah dikonfirmasi oleh Deputy; dan
- (3) Dokumen penyelesaian dari isu – isu strategis tersedia serta terverifikasi.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase penyelesaian isu-isu strategis adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Isu Isu Strategis yang Diselesaikan}}{\text{Total Isu Strategis yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100% yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024, Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi memiliki beban cakupan kerja yang sangat luas meliputi kerja sama ekonomi dalam format bilateral, regional, maupun multilateral, percepatan investasi dan hilirisasi, serta implementasinya dalam kebijakan ekonomi makro dan fiskal. Luasnya cakupan kerja tersebut membutuhkan peran Sekretariat Deputy untuk mengemban fungsi koordinasi kebijakan yang bersifat cross-sectoral sehingga dari seluruh fungsi Asisten Deputy dapat memberikan output rekomendasi kebijakan yang terarah dan tersinkronisasi.

Pada Triwulan I Tahun 2026, IKU Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputy ditetapkan target sebesar 25% dan berdasarkan hasil evaluasi, pengawalan substansi, dan pemantauan direktif pimpinan yang dilakukan oleh Sekretariat Deputy, indikator ini terealisasi sebesar 25% atau mencapai kinerja sebesar 100% dari target Tw I Tahun 2026, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.5 Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputy	Persen	25%	25%	100 % (Memuaskan)

Capaian optimal ini dicapai melalui keberhasilan unit dalam menyelesaikan penanganan tahapan awal isu-isu strategis. Faktor penentu keberhasilan capaian antara lain: 1) Arahan pimpinan yang terarah dan responsif dari Deputy dan Sekretaris Deputy memberikan kepastian bagi Tim Desk RI-China dalam merumuskan langkah penanganan isu secara presisi; 2) keberhasilan Sekretariat dalam membangun jalur komunikasi informal yang efektif (Grup Koordinasi Cepat) dengan K/L teknis terkait; 3) Kesiapan para pegawai dalam menyusun *background paper* dan analisis mendalam (*deep-dive analysis*) secara cepat dan berkualitas meskipun di bawah tekanan tenggat waktu yang ketat. Pencapaian target ini merupakan perwujudan kelancaran diplomasi ekonomi yang akuntabel.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.5 Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Pelaksanaan Kunjungan Lapang terkait Potensi Kerja Sama RI-RRT dalam Pengembangan Artificial Intelligence di Kawasan Industri Terpadu Indonesia – China di Cikarang	Terlaksana	Telah dilaksanakan Kunjungan Lapang terkait Potensi Kerja Sama RI-RRT dalam Pengembangan Artificial Intelligence di Kawasan Industri Terpadu Indonesia – China (KITIC) di Cikarang pada 13-15 Januari 2026 yang membahas terkait potensi kerja sama AI di kawasan tersebut.
2.	Koordinasi Pelatihan <i>Upskilling for Government Officials of Indonesia</i> bekerja sama dengan RRT	Terlaksana	Telah dilakukan Koordinasi Pelatihan Upskilling for Government Officials of Indonesia bekerja sama dengan RRT dengan berkomunikasi aktif dengan pihak RRT dan koordinasi internal antar unit Eselon II. Telah disampaikan Nota Dinas No. KSE.01.02/33/D.II.M.EKO N.1/2/2026 kepada pimpinan tanggal 3 Februari 2026 tentang Penyampaian Usulan Daftar Pegawai untuk Pelatihan dari Tiongkok.
3.	Koordinasi Posisi Indonesia terhadap usulan Pendirian Organisasi AI dunia (<i>World Artificial Intelligence</i>)	Terlaksana	1. Telah dilaksanakan permohonan Arahan Kepada Pimpinan (Bapak Menko Perekonomian) terkait keikutsertaan Indonesia dalam

	Cooperation Organization)		Inisiatif World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO). 2. Telah dihadapirinya Consultation Meeting on the Establlishment of World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO), pada tanggal 26 – 30 Januari 2026 di Beijing, RRT 3. Telah dilaksanakan rapat koordinasi posisi Indonesia terhadap keikutsertaan Indonesia dalam Inisiatif World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) dengan K/L terkait pada tanggal 26 Februari dan 4 Maret 2026 secara daring. 4. Telah dilaksanakan rapat koordinasi penyusunan masukan posisi Indonesia terhadap draft Agreement World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) dengan K/L terkait pada tanggal 9 Maret 2026 secara Hybrid.
--	---------------------------	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

1. Pertemuan koordinasi antar kementerian/Lembaga terkait dialihkan secara maksimal menggunakan platform pertemuan daring (*online meeting*) atau *hybrid*. Hal ini berhasil memangkas anggaran biaya sewa ruang rapat, konsumsi, dan biaya perjalanan dinas secara signifikan;
2. Seluruh dokumen draft agreement RI-China disusun, direviu, dan didistribusikan secara *paperless* melalui *shared-cloud workspace* internal, sehingga berhasil memotong alokasi belanja logistik alat tulis kantor (ATK) dan penggandaan dokumen fisik berskala besar.

Proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 88.578.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas lainnya sesuai arahan pimpinan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pada Triwulan 1 Tahun 2026, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan diantaranya:

1. Kerja sama ekonomi bilateral dengan China sering kali bersinggungan dengan berbagai sektor (seperti ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan fiskal) sehingga memerlukan energi koordinasi yang intensif dengan K/L terkait;
2. Dinamika kebijakan ekonomi global dan perubahan regulasi menuntut analisis yang tajam dan komprehensif;
3. Isu strategis dari pimpinan sering kali bersifat mendesak (*ad-hoc*) di luar kalender kerja rutin, sehingga menantang kapasitas personel yang terbatas untuk membagi fokus antara tugas rutin dan penyelesaian isu prioritas pimpinan secara simultan.

Berdasarkan capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026 serta kendala yang dihadapi, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yaitu:

1. Menerapkan metode diskusi terfokus yang ringkas, terarah, dan berbasis daring.
2. Memahami dinamika kebijakan ekonomi global dan perubahan regulasi yang terjadi dengan sharing knowledge antar pegawai serta memanfaatkan teknologi AI.
3. Mengompilasi seluruh dokumen terkait kerja sama Indonesia-China dalam satu database digital (*one drive*), guna mempercepat proses referensi bagi pegawai dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang nantinya disampaikan kepada pimpinan.

2.3. Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi

Latar Belakang

Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diemban. Ketercapaian sasaran strategis ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputy

Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Unit kerja melakukan pembangunan zona integritas yang nantinya akan dievaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI). Komponen penilaian pembangunan Zona Integritas terdiri dari: (Komponen dan kriteria dapat berubah mengikuti peraturan yang berlaku)

1. Nilai Komponen Pengungkit Zona Integritas dengan kriteria nilai minimal 42,75
2. Nilai Komponen Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi dengan kriteria nilai minimal 3,6
3. Nilai Komponen Hasil Subkomponen Hasil "Kinerja lebih baik" dengan kriteria nilai minimal 2,5
4. Nilai Komponen Hasil Survei Pelayanan Publik yang Prima dengan kriteria nilai minimal 3,2

Rumus Pengukuran:

$$\frac{\text{Nilai Komponen Penilaian}}{\text{Jumlah Seluruh Komponen Penilaian}} \times \frac{\text{Bobot Komponen Penilaian ke-n}}{\text{Jumlah Seluruh Bobot Komponen Penilaian ke-n}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 75% didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi. Adapun target triwulan sebesar N/A.

Pada Triwulan I Tahun 2026, Berdasarkan hasil penilaian mandiri dan verifikasi dokumen pendorong yang dilakukan oleh Sekretariat Deputy, Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi mencapai target yang telah terealisasi sebesar N/A atau mencapai N/A dari target Tahun 2026 sebesar 75% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.6 Persentase Pembangunan Zona	Persen	75%	N/A	100

Integritas Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi				
--	--	--	--	--

Realisasi triwulan I didorong oleh tingginya komitmen Sekretaris Deputy dalam pembangunan Zona Integritas maka diprediksikan target tahun 2026 dapat terpenuhi. Capaian signifikan ini terealisasi berkat akselerasi pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI pada 6 (enam) area perubahan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sekretariat Deputy telah berhasil merampungkan pembentukan Tim Kerja ZI, menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI, menetapkan Agen Perubahan (*Agent of Change*), serta merumuskan mitigasi risiko ke deputian terhadap pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara terstruktur di awal tahun anggaran.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1.6 Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Pembentukan Tim Zona Integritas	Terlaksana	Telah terbentuk Surat keputusan Deputy Terkait Tim Zona Integritas Nomor 6 Tahun 2026.
2.	Penyusunan rencana aksi Zona Integritas	Terlaksana	Telah disusun rencana aksi pembangunan zona integritas Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi

			dan Investasi tahun 2026.
3.	Komitmen pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Terlaksana	Telah dilaksanakan komitmen pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi oleh seluruh pegawai di melalui penandatanganan maklumat pelayanan oleh pimpinan, serta penandatanganan pakta integritas pada tanggal 31 Maret 2026.
4.	Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi Zona Integritas 2025	Terlaksana	Telah dilaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi Zona Integritas 2025 melalui penyusunan dokumen: 1) Laporan tindak lanjut dan perbaikan atas laporan hasil evaluasi pembangunan zona integritas 2025; 2) dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas deputi bidang koordinasi kerja sama ekonomi dan investasi tahun 2026.
5.	Sosialisasi pembangunan Zona Integritas Triwulan I	Terlaksana	Telah dilaksanakan Sosialisasi pembangunan Zona Integritas Triwulan I

6.	Koordinasi pelaporan bukti LHKPN dan penyampaian SPT Tahunan	Terlaksana	Telah dilaksanakan Koordinasi pelaporan bukti LHKPN dan penyampaian SPT Tahunan untuk semua pegawai di Kedeputan Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.
----	--	------------	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, terdapat upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja indikator ini antara lain dengan melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) untuk pembangunan Zona Integritas kepada seluruh stakeholder penerima layanan dari unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi pada periode Februari s.d Maret 2026 melalui laman: <https://tinyurl.com/ZID2Feb26> dan <https://tinyurl.com/ZID2Mar26>.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

1. Sosialisasi Kampanye ZI Berbasis Digital dimana publikasi, kampanye antisuap/antikorupsi, dan internalisasi maklumat pelayanan di lingkungan kedeputan mayoritas telah menggunakan media digital dan disebarkan melalui kanal komunikasi internal;
2. Seluruh dokumen pendorong (SK, Nota Dinas, Daftar Hadir, Foto Kegiatan) pada 6 area perubahan dikompilasikan ke dalam *cloud-based shared drive* internal.

Langkah-langkah tersebut mengefisienkan kebutuhan anggaran dokumen fisik yang biasanya memakan biaya logistik tinggi dalam penilaian ZI. Proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 88.578.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi atau kegiatan prioritas lainnya sesuai arahan pimpinan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yakni :

1. Tantangan untuk menanamkan pemahaman di seluruh lini pegawai bahwa pembangunan ZI bukan sekadar kompetisi administratif formalitas untuk meraih predikat WBK/WBBM, melainkan sebuah transformasi budaya kerja nyata dalam pelayanan;
2. Terdapat bukti dukung pembangunan ZI yang sebenarnya unit pengampunya di level Kementerian sehingga penyertaan bukti dukung Pembangunan ZI di

Unit kerja harus menunggu terselesaikannya dokumen tersebut sehingga berdampak pada kurang optimalnya nilai ZI yang diraih unit kerja.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain:

1. Menyelenggarakan sesi diskusi/ coaching clinic singkat terkait ZI dan/ atau area perubahannya melalui metode hibrida/daring;
2. Berkoordinasi secara intensif dengan unit pengampu serta unit kerja eselon II di lingkungan Kedeputan Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sehingga internalisasi budaya kerja yang akuntabel serta pemenuhan bukti dukung pembangunan ZI dapat dicapai dengan optimal.

2.4. Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Latar Belakang

Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diemban. Ketercapaian sasaran strategis ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Layanan Sekretaris Deputi adalah layanan yang diberikan oleh Sekretaris Deputi kepada Kedeputan untuk melaksanakan tugas koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan, tata kelola, dan dukungan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi koordinasi dan pemberian dukungan dalam:

1. Perencanaan, program dan anggaran;
2. Pengelolaan kinerja dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Pengelolaan sistem pengendalian internal;
4. Pengelolaan data dan sistem informasi;
5. Pengelolaan penataan organisasi, tata laksana, dan SDM;
6. Pengelolaan BMN;
7. Penataan kearsipan dan persuratan;
8. Pengelolaan hubungan masyarakat, keprotokolan, persidangan, dan penyiapan naskah pimpinan, dan administrasi;
9. Pemantauan, analisis dan evaluasi pengelolaan keuangan;
10. Pemantauan, evaluasi, dan laporan program kegiatan dan tata kelola; dan
11. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Deputi.

Indikator kepuasan layanan Sekretaris Deputi mengukur tentang tingkat kepuasan layanan koordinasi dan dukungan yang diberikan oleh Sesdep kepada Kedeputan

sesuai dengan tugas dan fungsi dari Sekretaris Deputy. Penilaian terhadap layanan ini didasarkan pada 5 (lima) aspek kualitas pelayanan yaitu :

1. Aspek Ketanggapan dalam layanan (*Responsiveness*);
Menggambarkan kesiapan dan kecepatan unit kerja dalam merespons permintaan, keluhan atau kebutuhan layanan
2. Aspek Keandalan dalam layanan (*Reability*);
Mengukur sejauh mana layanan yang diberikan sesuai dengan prosedur atau standar layanan
3. Aspek Sarana dan Prasarana Layanan (*Tangible*);
Menilai ketersediaan dan kualitas fisik/fasilitas, serta tampilan lingkungan kerja yang mendukung layanan
4. Aspek Kepastian dalam Layanan (*Assurance*);
Mengukur kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan, serta tingkat kepercayaan dan rasa aman
5. Aspek Sikap dalam Layanan (*Emphaty*)
Menunjukkan perhatian dan kepedulian secara personal dan manusiawi pada layanan yang diberikan

Seluruh aspek kepuasan ini dirata – rata dan diukur ke dalam indeks kepuasan layanan yang terdiri dari 4 (empat) kategori penilaian yaitu :

1. Sangat Tidak Puas
2. Tidak Puas
3. Puas
4. Sangat Puas

Indikator Kinerja Utama Indeks kepuasan layanan Sekretariat Deputy diukur melalui Survey Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi. Daftar pertanyaan survey terdiri dari beberapa pertanyaan berupa 5 (lima) jenis aspek layanan yang telah diberikan oleh Sesdep kepada Deputy. Jumlah responden dipilih secara acak/random dan berasal dari unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Rumus Perhitungan :

$$\frac{\sum \text{Jawaban dari masing masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$$

Nilai Indeks diperoleh berdasarkan nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, dengan 4 (empat) kategori penilaian yaitu :

- A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4
- B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
- C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
- D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 3 dari 4. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada dokumen perencanaan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama dan Investasi Tahun 2026. Adapun target triwulan sebesar N/A karena pada IKU Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi ditetapkan berdasarkan target semesteran yakni 3 dari 4 yang akan dicapai oleh Sekretariat Deputy dalam rangka pemenuhan kepuasan layanan Sekretaris Deputy dalam pelayanan kegiatan deputy serta administrasi program dan tata kelola bagi pegawai di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Pada Triwulan I Tahun 2026, Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi telah terealisasi sebesar N/A atau mencapai N/A dari target Tahun 2026 sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.7 Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Indeks	3 dari 4	3,66 (3 dari 4)	100%

Capaian optimal ini mencerminkan keberhasilan Sekretariat Deputy dalam memberikan layanan fasilitasi administratif dan teknis yang prima. Kualitas layanan ke deputian dinilai sangat memuaskan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik unit internal (Asisten Deputy) maupun mitra eksternal (Kementerian/Lembaga) teknis terkait.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.7 Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan

			(Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Persiapan penyusunan Survei Triwulan I	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat internal Sekretaris Deputi dalam rangka penguatan dalam memberikan layanan yang prima serta diantaranya arahan penyusunan survei kepuasan Triwulan I tahun 2026.
2.	Pelaksanaan Survei Kepuasan Triwulan I melalui link google form yang terintegrasi	Terlaksana	Telah terlaksana survei kepuasan di Semester I Tahun 2026 melalui link google form yang terintegrasi.
3.	Pelaksanaan Dialog Kinerja dalam rangka evaluasi total Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Terlaksana	Telah dilaksanakannya Dialog Kinerja dalam rangka evaluasi total Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi pada tanggal 31 Maret 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan membantu unit kerja Eselon II di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dalam penyusunan indikator dan formulir survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

1. Pelaksanaan survei kepuasan layanan dilakukan sepenuhnya secara digital menggunakan platform pengolah formulir daring secara gratis. Langkah ini memangkas anggaran pencetakan kuesioner fisik, biaya penggandaan, serta biaya logistik distribusi berbasis kertas;

2. Sekretariat Deputy memaksimalkan penggunaan aplikasi pesan instan koordinasi dan persuratan elektronik melalui SRIKANDI sebagai saluran komunikasi operasional. Hal ini secara signifikan menghemat biaya operasional harian kantor serta mempercepat waktu penyelesaian dokumen.

Proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 88.578.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas lainnya sesuai arahan pimpinan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan diantaranya

1. Tingkat partisipasi responden yang cukup rendah terutama bagi mitra yang memiliki mobilitas tinggi atau mitra yang berpandangan survei ini hanya untuk kepentingan administratif sekunder.
2. Banyaknya survei internal dan eksternal di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadikan responden yang mengisi kuesioner mengisi secara formalitas saja demi menggugurkan kewajiban, sehingga akurasi data menurun.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain:

1. Menjadikan pengisian survei sebagai bagian dari check-list penutupan sebuah agenda kegiatan/pertemuan
2. Memberikan narasi pengantar pada awalan survei supaya responden memiliki pemahaman dan mengisi survei dengan akurat.

Capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026 terlaksana dengan baik dan diharapkan pada triwulan selanjutnya target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai dengan optimal.

Jakarta, 10 April 2026

Plt. Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Kerja
Sama Ekonomi dan Investasi



Jenny MT. Sihombing